



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya semata, Dokumen "Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021" ini dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang memuat sasaran Program, kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2021 ini juga merupakan paparan agenda kerja dan target kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak.

Rangkaian Tugas pokok tersebut terdokumentasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari tiap Seksi dan atau Sub Bagian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak, dengan memperhatikan aspek keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi masing masing.

Dalam program kerja ini juga disampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas program dan tugas serta fungsi yang ada sesuai dengan kebutuhan yang senantiasa berkembang.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021 ini juga merupakan penjabaran operasional kegiatan di tahun 2021 yang telah disusun bersama seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta menjadi acuan kerja dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Kota Pontianak.

Pontianak, Januari 2021



H. H. Uray Indra Mulya, M.M

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	6
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	7
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	9
3.1. Program dan Kegiatan.....	9
3.2 Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan.....	12
BAB IV PENUTUP.....	22
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Logical Frame Work Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak Dan Pencapaian Misi Kota Pontianak Tahun 2021.....	8
Tabel 3.1 Target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13
Tabel 3.2 Target Kinerja Program Aplikasi Informatika	16
Tabel 3.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18
Tabel 3.4 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	19
Tabel 3.5 Target Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan tiga bidang, yaitu: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika, dan Bidang Statistik Sektoral.

Pemerintah Daerah Kota Pontianak memiliki visi yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat". Sebagai implementasi lanjut dari visi tersebut, maka dirumuskan misi yang memperjelas rincian tujuandan sasaran pembangunan kesehatan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representative.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan. :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendukung perwujudan visi dan misi ke 3 dari Pemerintah Kota Pontianak. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (RENSTRA), kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak juga melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak juga menjadi satu diantara komponen sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menetapkan target sasaran program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode waktu 1 (satu) tahun kedepan dan akan menjadi dasar dalam penentuan perjanjian kinerja yang akan dievaluasi melalui pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi/lembaga pemerintah berdasarkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan menjadi penjabaran dari Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dan menjadi acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 ini adalah:

- a. sebagai pedoman dan acuan untuk penyelenggaraan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

1.3 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap

1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9).
 9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).
 11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;

13. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, dan sistematika penulisan dokumen RKT ini.

BAB II RENCANA KERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN

Menjabarkan rencana program dan kegiatan serta target indikator kinerja yang ditentukan pada tahun 2021

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

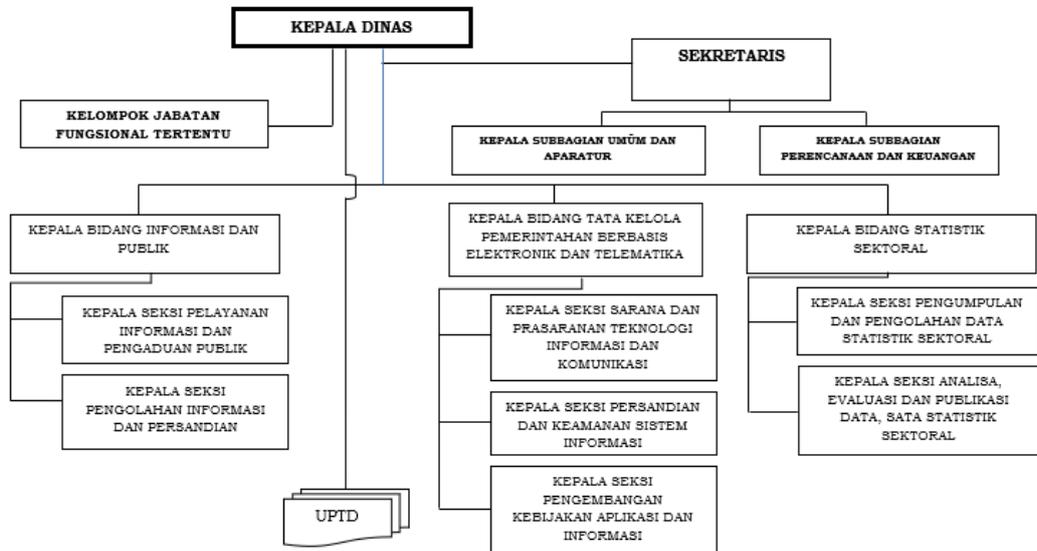
Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi, bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, maka struktur organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana bagan 2.1.

Gambar. 2
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



Gambar II.1 Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 dalam mensinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas adalah untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien
2. Transparansi Informasi Publik

Lebih jelasnya sebagaimana tercantum pada gambar 2.2.

Tabel 2.1
LOGICAL FRAME WORK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
DAN PENCAPAIAN MISI KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
Misi 3 :	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71,74	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Gambar II.2 Logical Framework Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perubahan Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Aplikasi Informatika
 - 2.1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 2.2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 3.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 4.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - Manajemen Komunikasi Krisis
 - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 5.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Pengembangan Infrastruktur
 - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

3.2 Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki 5 program dan 12 kegiatan serta 58 sub kegiatan. Untuk rincian target kinerja program dan kegiatan dapat dilihat sebagaimana terlampir berikut ini.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program Penunjang Urusan Pemerintah meliputi pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan perangkat kerja, dimana terdapat 5 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Adapun indikator kinerja hasil Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Presentase tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan sebesar 92%.

Tabel 3.1

Target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	92 persen	Rp.2.556.869.283
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 dokumen	Rp.31.257.091
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	Rp 8.099.010
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	54 Sub Kegiatan	Rp.2.800.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20 Sub Kegiatan	Rp.4.300.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	12 Kegiatan	Rp.2.300.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10 Kegiatan	Rp.2.300.000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	Rp.5.928.230

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	Rp.5.529.851
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	Rp.505.697.630
1.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	Rp.174.910.762
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	Rp.316.620.000
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	Rp.3.180.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp.1.098.967
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	Rp.9.887.901
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Rp.131.360.000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	81 stel	Rp.80.680.000
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	4 orang	Rp.50.680.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Rp.492.033.308
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Rp.259.978.654
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Rp.10.137.061

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp.174.940.346
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Rp.36.777.247
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yg diselenggarakan	12 bulan	Rp.10.200.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68 unit	Rp.899.814.154
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	30 unit	Rp.460.864.452
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	37 unit	Rp.76.705.781
1.5.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	1 unit	Rp.36.207.600
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	12 bulan	Rp.189.303.600
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Rp.140.596.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	Rp.12.500.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Rp.36.207.600
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah yang dipelihara	68 Unit	Rp.307.403.500
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2 unit	Rp.215.621.500

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	59 unit	Rp.39.532.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	Rp.52.250.000

b. Program Target Kinerja Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan diikuti sebanyak 9 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika berupa pengembangan aplikasi. Adapun indikator kinerja hasil Program Aplikasi Informatika berupa Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE sebesar 91%.

Tabel 3.2

Target Kinerja Program Aplikasi Informatika

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
2.	Program Aplikasi Informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	91 Persen	Rp.3.402.691.040
2.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	65 Domain / Sub Domain	Rp.1.041870.627
2.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	65 domain / sub domain	Rp.129.531.990

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
2.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 OPD	Rp.912.338.637
2.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2 Aplikasi /Layanan Publik	Rp.2.360.820.413
2.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	1 kali	Rp.9.600.000
2.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	30 OPD	Rp.1.510.144.925
2.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	3 Aplikasi	Rp.291.080.000
2.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	1 Aplikasi	Rp.68.839.800
2.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	24 OPD	Rp.385.153.350
2.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5 sistem	Rp.10.000.000
2.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1 laporan	Rp.86.002.338

c. Program Target Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan diikuti sebanyak 4 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika berupa pengamanan informasi. Adapun Indikator hasil kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi berupa Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dengan target capaian cukup baik.

Tabel 3.3
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian
Untuk Pengamanan Informasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik Indeks	Rp.246.785.480
3.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1 area	Rp.246.785.480
3.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1 dokumen	Rp.24.991.800
3.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	6 sistem	Rp.66.990.000
3.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem	6 sistem/ kegiatan	Rp.92.903.680

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
		manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS		
3.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7 Sertifikat elektronik	Rp.61.900.000

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan diikuti sebanyak 6 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Statistik Sektoral berupa tingkat penyebaran data dan informasi. Adapun Indikator hasil Kinerja Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral berupa Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak dengan target kinerja sebesar 90%.

Tabel 3.4
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	90 persen	Rp.559.708.964
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbarukan/terupdate	1500 data	Rp.559.708.964
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan	4 Kali	Rp.130.772.845

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
		pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak		
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	2 kali	Rp.30.808.936
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100 buku	Rp.41.850.000
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250 buku	Rp.71.690.000
4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	100 buku	Rp.284.587.183
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	1500 data	
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	30 kali	

e. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program Informasi Dan Komunikasi Publik dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan diikuti sebanyak 8 sub kegiatan, dari program ini dilaksanakan untuk menunjang program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika berupa tingkat penyebaran informasi. Adapun Indikator hasil Kinerja Program Informasi Dan Komunikasi Publik berupa Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dengan target capaian 89,44%.

Tabel 3.5
Target Kinerja Program Informasi Dan Komunikasi Publik

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi	Anggaran Renja
5	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	89,44 persen	Rp.1.000.189.814
5.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12 informasi	Rp.1.000.189.814
5.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	0 Dokumen	Rp -
5.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	12 konten	Rp.428.365.500
5.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4 kali / media	Rp.102.537.920
5.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	480 pengaduan	Rp.114.189.850
5.1.5	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	20 kali	Rp.109.980.500
5.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	6 komunitas	Rp.125.528.145
5.1.7	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	2 dokumen	Rp.40.295.999
5.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	40 informasi	Rp.79.291.900

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	I	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	91	Persen	Rp.3.402.691.040	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
	1.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	163	Domain / Sub Domain	Rp.1.041.870.627	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
	1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	165	domain / sub domain	Rp.129.531.990	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5	OPD	Rp.912.338.637	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2	Aplikasi / Layanan Publik	Rp.2.360.820.413	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Penanggungjawab	
				Target	Rp		
	1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	1	kali	Rp.9.600.000	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
	1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan e-government	30	OPD	Rp.1.510.144.925	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	5	Aplikasi	Rp.291.080.000	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
	1.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem penghubung Layanan Pemerintah	1	Aplikasi	Rp.68.839.800	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
	1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	24	OPD	Rp.385.153.350	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
	1.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5	sistem	Rp.10.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
	1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	laporan	Rp.86.002.338	Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Indeks	Rp.246.785.480	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
	2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	area	Rp.246.785.480	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
	2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1	dokumen	Rp.24.991.800	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
	2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	6	sistem	Rp.66.990.000	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
	2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	6	sistem/kegiatan	Rp.92.903.680	Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
	2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7	Sertifikat elektronik	Rp.61.900.000	Kasi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
Transparansi Informasi Publik	3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	89,44	persen	Rp.1.000.189.814	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12	informasi	Rp.1.000.189.814	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	3.1.1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	12	konten	Rp 428.365.500	Seksi Pengolahan Informasi dan Kemitraan Media
	3.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4	kali / media	Rp 102.537.920	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
	3.1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	480	pengaduan	Rp 114.189.850	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
	3.1.4	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	20	kali	Rp 109.980.500	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
	3.1.5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	6	komunitas	Rp 125.528.145	Seksi Pengolahan Informasi dan Kemitraan Media
	3.1.6	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	2	dokumen	Rp 40.295.999	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
	3.1.7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	40	informasi	Rp 79.291.900	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik
	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	90	persen	Rp 559.708.964	Bidang Statistik Sektoral
	4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	1500	data	Rp 559.708.964	Bidang Statistik Sektoral

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
	4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	4	Kali	Rp 130.772.845	Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
	4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	2	kali	Rp 30.808.936	Seksi Analisa, Evaluasi dan Publikasi
	4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100	buku	Rp 41.850.000	Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
	4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250	buku	Rp 71.690.000	Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
	4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	100	buku	Rp 284.587.183	Seksi Analisa, Evaluasi dan Publikasi
2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;			1500	data			
3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral			30	kali			
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	92	persen	Rp 2.556.869.283	Sekretariat

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
	5.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18	dokumen	Rp 31.257.091	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	Rp 8.099.010	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	54	Sub Kegiatan	Rp 2.800.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20	Sub Kegiatan	Rp 4.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	12	Kegiatan	Rp 2.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10	Kegiatan	Rp 2.300.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	Rp 5.928.230	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	Rp 5.529.851	Subbag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
	5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	bulan	Rp 505.697.630	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	Rp 174.910.762	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	Rp 316.620.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	bulan	Rp 3.180.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	Rp 1.098.967	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	laporan	Rp 9.887.901	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	bulan	Rp 131.360.000	Subbag Umum dan Aparatur
	5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	81	stel	Rp 80.680.000	Subbag Umum dan Aparatur

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi			Penanggungjawab
				Target		Rp	
	5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	4	ASN	Rp 50.680.000	Subbag Umum dan Aparatur
	5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12	bulan	Rp 492.033.308	Subbag Umum dan Aparatur
	5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	Rp 259.978.654	Subbag Umum dan Aparatur
	5.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	bulan	Rp 10.137.061	Subbag Umum dan Aparatur
	5.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	Rp 174.940.346	Subbag Umum dan Aparatur
	5.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	Rp 36.777.247	Subbag Umum dan Aparatur
	5.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	bulan	Rp 10.200.000	Subbag Umum dan Aparatur
	5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68	unit	Rp 899.814.154	Subbag Umum dan Aparatur
	5.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	30	unit	Rp 460.864.452	Subbag Umum dan Aparatur
	5.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	37	unit	Rp 76.705.781	Subbag Umum dan Aparatur
	5.5.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	1	unit	Rp 362.243.921	Subbag Umum dan Aparatur

Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2021) yang dievaluasi		Penanggungjawab	
				Target	Rp		
	5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	bulan	Rp 189.303.600	Subbag Umum dan Aparatur
	5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	Rp 140.596.000	Subbag Umum dan Aparatur
	5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	bulan	Rp 12.500.000	Subbag Umum dan Aparatur
	5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	Rp 36.207.600	Subbag Umum dan Aparatur
	5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	62	Unit	Rp 307.403.500	Subbag Umum dan Aparatur
	5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2	unit	Rp 215.621.500	Subbag Umum dan Aparatur
	5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	59	unit	Rp 39.532.000	Subbag Umum dan Aparatur
	5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	Rp 52.250.000	Subbag Umum dan Aparatur
Total						Rp.7.766.244.581	

Tabel.
LOGICAL FRAME WORK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
DAN PENCAPAIAN MISI KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG
Misi 3 :	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	71,74	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

IR. H. URAY INDRA MULYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 198903 1 004

**CASCADING KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021**

VISI KOTA PONTIANAK : **PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT**
MISI 3 KOTA PONTIANAK : **Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas**

Sasaran Kota : Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator Kota : Indeks Reformasi Birokrasi

TARGET KINERJA

Penanggung Jawab

S.1	: Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien			Kepala Dinas
IK.1	: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,5		Ess. 2
S.1.1	: Meningkatnya penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak			Kepala Bidang
IK.1.1	: Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	91	Persen	Ess. 3
S.1.1.1	: Meningkatnya pengelolaan domain dan sub domain dalam jaringan intra pemerintah daerah			Kepala Seksi
IK.1.1.1	: Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	65	Domain / Sub Domain	Ess. 4
S.1.1.1.1	: Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			Kepala Seksi
IK.1.1.1.1	: Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	165	domain / sub domain	Ess. 4
S.1.1.1.2	: Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			

IK.1.1.1.2	: Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5	OPD	
S.1.1.2	: Terintegrasinya layanan publik dan administrasi yang di Pemerintah Kota Pontianak			Kepala Seksi
IK.1.1.2	: Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	21	Aplikasi / Layanan Publik	Ess. 4
S.1.1.2.1	: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government			Kepala Seksi
IK.1.1.2.1	: Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	1	kali	Ess. 4
S.1.1.2.2	: Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah			
IK.1.1.2.2	: jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	30	OPD	
S.1.1.2.3	: Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik			
IK.1.1.2.3	: Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	5	Aplikasi	
S.1.1.2.4	: Terelenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah			
IK.1.1.2.4	: Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1	Aplikasi	
S.1.1.2.5	: Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas			
IK.1.1.2.5	: Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	24	OPD	
S.1.1.2.6	: Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah			
IK.1.1.2.6	: Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5	sistem/OPD	
S.1.1.2.7	: Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE			

	IK.1.1.2.7	: Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	Laporan	
S.1.2	: Meningkatnya keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak				Kepala Bidang
IK.1.2	: Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		Cukup Baik	Indeks	Ess. 3
S.1.2.1	: Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				Kepala Seksi
IK.1.2.1	: Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian		1	area	Ess. 4
S.1.2.1.1	: Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Kepala Seksi
IK.1.2.1.1	: Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah		1	dokumen	Ess. 4
S.1.2.1.2	: Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota				
IK.1.2.1.2	: jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah		6	sistem	
S.1.2.1.3	: Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik				
IK.1.2.1.3	: jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS		6	sistem / kegiatan	
S.1.2.1.4	: Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota				
IK.1.2.1.4	: Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah		7	Sertifikat elektronik	

Sasaran Kota : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

TARGET KINERJA

Penanggung Jawab

Indikator Kota : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

S.2 : Transparansi Informasi Publik				Kepala Dinas
IK.2 : Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		Baik		Ess. 2
S.2.1 : Meningkatnya penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				Kepala Bidang
IK.2.1 : Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		89,44	persen	Ess. 3
S.2.1.1 : Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				Kepala Seksi
IK.2.1.1 : Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat		12	informasi	Ess. 4
S.2.1.1.1 : Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik				Kepala Seksi
IK.2.1.1.1 : Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi		12	konten	Ess. 4
S.2.1.1.2 : Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik				
IK.2.1.1.2 : Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi		4	kali / media	
S.2.1.1.3 : Terlaksananya pelayanan informasi publik				
IK.2.1.1.3 : Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi		480	pengaduan	

S.2.1.1.4	: Terselenggaranya layanan hubungan media		
IK.2.1.1.4	: Jumlah siaran pers yang dilakukan	20	kali
S.2.1.1.5	: Terselenggaranya kemitraan dengan pemangku kepentingan		
IK.2.1.1.5	: jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	6	komunitas
S.2.1.1.6	: Terselenggaranya manajemen komunikasi krisis pemerintah daerah		
IK.2.1.1.6	: jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	2	dokumen
S.2.1.1.7	: Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah		
IK.2.1.1.7	: Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	40	informasi

S.2.2	: Meningkatkan keterselenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak		
IK.2.2	: Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	90	persen

S.2.2.1	: Terselenggaranya Statistik Sektoral di Kota Pontianak		
IK.2.2.1	: Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	1500	data
S.2.2.1.1	: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
IK.2.2.1.1	: Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	4	Kali
S.2.2.1.2	: Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		

Kepala Bidang

Ess. 3

Kepala Seksi

Ess. 4

Kepala Seksi

Ess. 4

IK.2.2.1.2	: Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	2	kali	
S.2.2.1.3	: Tersedianya Metadata Statistik Sektoral			
IK.2.2.1.3	: Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100	buku	
S.2.2.1.4	: Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral			
IK.2.2.1.4	: Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250	buku	
S.2.2.1.5	: Terselenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah			
IK.2.2.1.5	: 1) Jumlah Buku Profil Daerah;	50	buku	
	: 2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	1500	data	
	: 3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	30	kali	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

IR. H. URAY INDRA MULYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610329 198903 1 004

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan								
		Tri 1		Tri 2				Tri 3					Tri 4																				
		1	2	3	4			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11								
1.	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE		91	Persen		Rp 3.402.691.040																					
							1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	65	domain / Sub Domain			Rp 1.041.870.627																		
							1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.1	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	165	domain / sub domain			Pengelolaan (pemberian nama domain, pengawasan dan evaluasi domain di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak)	Rp 129.531.990	Seksi Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi																
							1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	1.2	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra	5	OPD			Pembangunan jaringan intra pemerintah daerah (jaringan fiber optic)	Rp 912.338.637	Seksi Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi																

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4									
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11
						Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah																	
						2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2. Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	21	Aplikasi / Layanan Publik	Rp 2.360.820.413														
						2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.1 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	1	kali	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	Rp 9.600.000	Seksi Pengembangan Kebijakan Dan Aplikasi Informatika												
						2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	2.2 jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	30	OPD	Operasional server / pusat data pemerintah daerah	Rp 1.510.144.925	Seksi Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi												

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan													
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4																						
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12																		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11													
						2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2.7	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	Laporan		Analisis dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak	Rp 86.002.338	Seksi Pengembangan Kebijakan Dan Aplikasi Informatika																						
1.	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3,5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		Cukup Baik		Indeks				Rp 246.785.480																					
						3.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	area			Rp 246.785.480																							
						3.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.1	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1	dokumen			Rp 24.991.800				Seksi Persandian Dan Keamanan Sistem Informasi																			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan				
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4													
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11				
						3.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.2 jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	6 sistem	Pemeriksaan / audit sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 66.990.000	Seksi Persandian Dan Keamanan Sistem Informasi																	
						3.3 Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.3 jumlah aplikasi sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titi komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMK berdasarkan PHKS	6 sistem / kegiatan	Pelaksanaan pengamanan sistem elektronik / kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 92.903.680	Seksi Persandian Dan Keamanan Sistem Informasi																	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan				
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4													
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11			
						3.4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.4 Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7 Sertifikat elektronik	Penerbitan Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Digital untuk Kepala Perangkat Daerah / Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 61.900.000	Seksi Persandian Dan Keamanan Sistem Informasi																	
2. Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik				Baik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	89,44 persen		Rp 1.000.189.814																		
						4. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4. Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	12 informasi		Rp 1.000.189.814																		
						4.1 Pengelolaara Konten dan Perencanaan Media Komunikas Publik	4.1 Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	12 konten	Pembuatan konten informasi dan penyebaran informasi melalui media sosial	Rp 428.365.500	Seksi Pengolahan Informasi Dan Kemitraan Media																	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan									
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4																		
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12														
1	2	3				4	5				6	7	8	9	10												11						
						4.2	Pengelolaan Media Komunikas Publik	4.2	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4	kali / media	Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta pelaksanaan diseminasi informasi	Rp 102.537.920	Seksi Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Publik																			
						4.3	Pelayanan Informasi Publik	4.3	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	480	pengaduan	Pengelolaan layanan pengaduan publik	Rp 114.189.850	Seksi Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Publik																			
						4.4	Layanan Hubungan Media	4.4	Jumlah siaran pers yang dilakukan	20	kali	Pelaksanaan siaran pers / penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan media elektronik	Rp 109.980.500	Seksi Pengolahan Informasi Dan Kemitraan Media																			
						4.5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4.5	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi	6	komunitas	Pembinaan dan pemberdayaan komunitas (Kelompok Informasi Masyarakat)	Rp 125.528.145	Seksi Pengolahan Informasi Dan Kemitraan Media																			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan			
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4												
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11			
							kebijakan pemerintah																				
						4.6	Manajemen Komunikasi Krisis	4.6	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	2	dokumen	Pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 40.295.999	Seksi Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Publik													
						4.7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4.7	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	40	informasi	Pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media PPID Kota Pontianak	Rp 79.291.900	Seksi Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Publik													
2.	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik			Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	90	persen			Rp 559.708.964														
						5.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	5.	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	1500	data			Rp 559.708.964													
						5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.1	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan	4	Kali	1) Koordinasi dan sinkronisasi dan pengumpulan data statistik sektoral ; 2) Forum Data Kota Pontianak			Rp 130.772.845	Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data Statistik Sektoral											

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan		
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4											
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11		
							Forum Data Kota Pontianak																			
						5.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5.2	Jumlah bimtek sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	2	kali	Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan terkait pengumpulan data statistik sektoral	Rp 30.808.936	Seksi Analisa, Evaluasi Dan Publikasi Data Statistik Sektoral												
						5.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	5.3	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100	buku	Pengumpulan kuisisioner metadata dan penyusunan Buku Metadata	Rp 41.850.000	Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data Statistik Sektoral												
						5.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	5.4	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250	buku	Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data statistik sektoral, data dinamis dan Pontianak Dalam Angka	Rp 71.690.000	Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data Statistik Sektoral												
						5.5	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	5.5	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	50	buku	Penyusunan profil Kota Pontianak	Rp 284.587.183	Seksi Analisa, Evaluasi Dan Publikasi Data Statistik Sektoral												

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan	
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4										
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11	
								2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	150 data																
								3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	30 kali																
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Pontianak			Nilai SAKIP A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	92 persen		Rp 6.617.781.273															
						6. Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Kinerja	6. Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan		Rp 31.257.091															
						6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen		Rp 8.099.010	Subbag Perencanaan Dan Keuangan														

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan		
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4											
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11	
									Rencana Kerja; 7) Manajemen Resiko																	
						6.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.2 Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	54 Sub kegiatan	Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan rencana kerja anggaran	Rp 2.800.000	Subbag Perencanaan Dan Keuangan															
						6.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.3 Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20 Sub kegiatan	Pelaksanaan Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan rencana perubahan anggaran /sub kegiatan	Rp 4.300.000	Subbag Perencanaan Dan Keuangan															
						6.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.4 Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	12 Kegiatan	Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Rp 2.300.000	Subbag Perencanaan Dan Keuangan															
						6.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.5 Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10 Kegiatan	Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perubahan	Rp 2.300.000	Subbag Perencanaan Dan Keuangan															
						6.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	6.6 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	5 Laporan	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah, LPPD, Bahan	Rp 5.928.230	Subbag Perencanaan Dan Keuangan															

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan	
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4										
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD yang disusun		LKPJ Tahunan, Laporan SPIP Semester I, Laporan SPIP Semester II																
						6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.7 Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	Rp 5.529.851	Subbag Perencanaan Dan Keuangan														
						7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7. Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	12	bulan	Rp 5.428.783.576															
						7.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.1 Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan	12	bulan	Rp 4.923.085.946	Subbag Perencanaan Dan Keuangan														

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan									
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4																		
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12														
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11								
						7.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.2	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	Penyediaan jasa pelaksanaan tugas ASN (tenaga non ASN)	Rp 174.910.762	Subbag Perencanaan Dan Keuangan																			
						7.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7.3	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	Pelaksanaan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Rp 316.620.000	Subbag Perencanaan Dan Keuangan																			
						7.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.4	Jangka waktu pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	bulan	Pelaksanaan koordinasi akuntansi keuangan perangkat daerah	Rp 3.180.000	Subbag Perencanaan Dan Keuangan																			
						7.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Penyusunan CALK Perangkat Daerah	Rp 1.098.967	Subbag Perencanaan Dan Keuangan																			
						7.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / Semesteran SKPD	7.6	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah (LRA, LO, LPE dan Neraca)	Rp 9.887.901	Subbag Perencanaan Dan Keuangan																			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan		
		Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4			Tri 1					Tri 2			Tri 3			Tri 4								
		1	2	3	4			1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5		6		7	8	9	10												11	
						8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8. Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	12	bulan		Rp 80.680.000																
						8.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.1 Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	81	stel	Pengadaan pakaian dinas ASN dan Non ASN	Rp 50.680.000	Subbag Umum Dan Aparatur															
						8.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.2 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	4	orang	Pelaksanaan diklat dan bimtek ASN	Rp 30.000.000	Subbag Umum Dan Aparatur															
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Pontianak				9. Administrasi Umum	9. Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12	bulan		Rp 259.978.654																
						9.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.1 Jangka waktu penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	Rp 10.137.061	Subbag Umum Dan Aparatur															
						9.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.2 Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	bulan	Penyediaan makan minum rapat, alat kebersihan dan logistiki	Rp 174.940.346	Subbag Umum Dan Aparatur															

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan			
		Tri 1		Tri 2								Tri 3			Tri 4												
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11			
						10.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.2	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37	unit	Pengadaan komputer, laptop dan peralatan / mesin lainnya	Rp 362.243.921	Subbag Umum Dan Aparatur													
						10.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	10.3	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	1	unit	Pengadaan software windows original	Rp 21.914.750	Subbag Umum Dan Aparatur													
						11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan		Rp 140.596.000														
						11.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.1	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	Penyediaan materai dan biaya pengiriman	Rp 12.500.000	Subbag Umum Dan Aparatur													
						11.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	11.2	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	bulan	Pembayaran langganan internet / indihome	Rp 36.207.600	Subbag Umum Dan Aparatur													
						11.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.3	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor	Rp 91.888.400	Subbag Umum Dan Aparatur													
						12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	12	unit		Rp 215.621.500														

**KERTAS KERJA EVALUASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	1.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	YA	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Persen	91	Rp 3.647.150.040	
					1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan domain dan sub domain dalam jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Domain / Sub Domain	65	Rp 1.241.870.627

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	domain / sub domain	65	Rp 229.531.990	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
				2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	5	Rp 1.012.338.637	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	
				2 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terintegrasinya layanan publik dan administrasi yang di Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Aplikasi / Layanan Publik	21	Rp 2.405.279.413	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TI/DAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	kali	1	Rp 54.059.000	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
					2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	OPD	30	Rp 1.510.144.925,00	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
					3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	Aplikasi	6	Rp 291.080.000	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TI/DAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
									Tahun 2021			
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	1	Rp 68.839.800	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
					5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	OPD	24	Rp 385.153.350	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
					6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	sistem/OPD	5	Rp 10.000.000	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	Laporan	1	Rp 86.002.338	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik		Rp 252.885.480	
					1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	area	1	Rp 252.885.480	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TI/DAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	dokumen	1	Rp 24.991.800	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
					2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	sistem	6	Rp 66.990.000	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	sistem / kegiatan	6	Rp 99.003.680	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
					4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Sertifikat elektronik	7	Rp 61.900.000	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Transparansi Informasi Publik		Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	YA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	persen	89,44	Rp 1.045.675.814	
					1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	informasi	12	Rp 1.045.675.814	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	konten	12	Rp 428.365.500	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TI/DAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	kali / media	4	Rp 148.023.920	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					3 Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	pengaduan	480	Rp 114.189.850	Bidang Informasi & Komunikasi Publik
					4 Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya layanan hubungan media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	kali	20	Rp 109.980.500	Bidang Informasi & Komunikasi Publik
					5 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya kemitraan dengan pemangku kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	komunitas	6	Rp 125.528.145	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					6 Manajemen Komunikasi Krisis	Terselenggaranya manajemen komunikasi krisis pemerintah daerah	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	dokumen	2	Rp 40.295.999	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					7 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	informasi	40	Rp 79.291.900	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya keter selenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	persen	90	Rp 559.708.964	
					1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Kota Pontianak	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	data	1500	Rp 559.708.964	Bidang Statistik Sektoral

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab	
									Tahun 2021			
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	Kali	4	Rp 130.772.845	Bidang Statistik Sektoral
					2. Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	kali	2	Rp 30.808.936	Bidang Statistik Sektoral
					3. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	buku	100	Rp 41.850.000	Bidang Statistik Sektoral

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	buku	250	Rp 71.690.000	Bidang Statistik Sektoral
					5 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah; 2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak; 3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	buku data kali	50 1500 30	Rp 284.587.183	Bidang Statistik Sektoral
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	TIDAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	persen	92	Rp 1.951.294.466	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TI/DAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Pontianak		1. Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Kinerja	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	Rp 32.856.230	Sekretariat
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	Rp 10.099.010	Sekretariat
					2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Sub kegiatan	54	Rp 3.800.000	Sekretariat
					3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Sub kegiatan	20	Rp 4.300.000	Sekretariat
					4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	12	Rp 3.300.000	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TI/DAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kegiatan	10	Rp 2.300.000	Sekretariat
					6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	5	Rp 3.527.369	Sekretariat
					7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	Rp 5.529.851	Sekretariat
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	bulan	12	Rp 610.697.630	Sekretariat
					1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi	bulan	12	Rp 274.910.762	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							pelaksanaan tugas ASN				
					2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	Rp 316.620.000	Sekretariat
					3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya akuntansi SKPD	Jangka waktu pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	Rp 5.180.000	Sekretariat
					4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 3.098.967	Sekretariat
					5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 10.887.901	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Semesteran SKPD						
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	bulan	12	Rp 100.680.000	Sekretariat
					1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	81	Rp 70.680.000	Sekretariat
					2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	orang	4	Rp 30.000.000	Sekretariat
					3. Administrasi Umum	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	bulan	12	Rp 319.978.654	Sekretariat
					1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	bulan	12	Rp 10.137.061	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Bangunan Kantor		an Bangunan Kantor				
					2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12	Rp 224.940.346	Sekretariat
					3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	Rp 36.777.247	Sekretariat
					4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	Rp 10.200.000	Sekretariat
					5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	12	Rp 37.924.000	Sekretariat
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	unit	68	Rp 510.864.452	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TI/DAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Pemerintah Daerah		daerah yang diadakan				
					1. Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	30	Rp 106.705.781	Sekretariat
					2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	37	Rp 362.243.921	Sekretariat
					3. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya aset tak berwujud penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	unit	1	Rp 41.914.750	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	Rp 160.596.000	Sekretariat
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	Rp 12.500.000	Sekretariat
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	bulan	12	Rp 56.207.600	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	Rp 91.888.400	Sekretariat
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	12	Rp 215.621.500	Sekretariat
				4.	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	2	Rp 39.532.000	Sekretariat
					1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	59	Rp 52.250.000	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU KOTA (YA/TIDAK)	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab
									Tahun 2021		
									Target Kinerja	PAGU Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	1	Rp 123.839.500	Sekretariat
Tota Belanja										Rp 7.456.714.764	



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK